

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan salah satu studi yang telah terjadi pada masa lalu yang berfokus pada kajian mengenai perang dan damai yang bersifat *high politics*. Hubungan internasional pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II untuk mencapai kepentingan nasionalnya maka negara-negara cenderung menggunakan perang sebagai satu-satunya cara demi mendapatkan dan menguasai sistem internasional. Namun hubungan internasional selalu bergerak dinamis dengan banyaknya isu yang bermunculan dan tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada isu yang bersifat *high politics*, tetapi juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara atau non negara dengan mementingkan *soft power* demi mencapai kepentingan nasionalnya.

Perkembangan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan informasi telah membawa perubahan bagi situasi politik internasional saat ini yang semakin kompleks. Perkembangan ini juga memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi lintas batas. Informasi dapat dengan cepat tersebar terus-menerus melalui media massa. Informasi mengenai dunia politik tidak lagi menjadi hal yang sakral karena hal tersebut telah banyak hadir di keseharian masyarakat (Urfan, 2011).

Perkembangan teknologi pada bidang komunikasi dan informasi membuat momen ini memberikan efek terhadap kegiatan diplomasi dan usaha pemerintah untuk mendapatkan simpati publik dari berbagai negara (*USC Center on Public*

Diplomacy). Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. Teknologi informasi berdampak misalnya pada publikasi jalannya negosiasi dan produk kebijakan diplomasi yang dapat dengan mudah diakses publik (Djelantik, 2008).

Dalam perkembangannya, diplomasi publik berkembang dengan apa yang disebut dengan diplomasi digital. Diplomasi digital menjadi topik yang hangat diperbincangkan karena kecepatannya dalam penyebaran informasi. Internet yang digunakan dalam diplomasi digital mengubah cara berinteraksi. Ying Jing dalam Madu (2018) menyebutkan bahwa terdapat cara yang lebih efektif dari sekedar penggunaan diplomasi publik konvensional, yaitu penggunaan media sosial oleh kedutaan akan jauh lebih efektif dalam berinteraksi dengan kelompok sasarannya.

Dalam jurnal Fitriah & Haryanto (2017) menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam media sosial yang ada seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Youtube*, dan berbagai macam media sosial lainnya yang digunakan oleh berbagai negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka dan menampilkan citra positif dari negara tersebut. Berdasarkan laporan yang tercantum di dalam jurnal tersebut Fitriah & Haryanto (2017) memaparkan bahwa 45 negara Uni Eropa dan seluruh negara yang terdapat di Amerika Selatan kecuali Suriname memiliki akun resmi di Twitter dan lebih dari tiga perempat pemerintah dan juga termasuk pemimpin negara tersebut memiliki akun di Twitter.

Kebijakan luar negeri bangsa merupakan alat yang digunakan untuk

mewujudkan kepentingan nasional di luar negeri (Windiani, 2013). Dalam kebijakan luar negeri, sederhananya hanya terdapat dua elemen; kepentingan nasional yang ingin dicapai, serta cara yang digunakan untuk mencapainya (Adesina, 2017). Dalam upayanya mencapai kepentingan nasional, kebijakan luar negeri memiliki berbagai macam alat atau instrumen yang dapat digunakan, dan salah satunya adalah diplomasi. Diplomasi secara luas dapat dipahami sebagai pelaksanaan hubungan antar negara dan entitas lain dalam politik dunia melalui agen-agen perwakilan resmi dan dengan cara yang damai.

Berbicara mengenai diplomasi sebagai salah satu instrumen dari kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya, fenomena menarik untuk dibahas adalah diplomasi publik pada masa pemerintahan Joko Widodo yang menunjukkan Indonesia lebih meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam kegiatan diplomatiknya. Dapat dilihat empat tahun terakhir, penggunaan platform online seperti web dan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia menunjukkan Indonesia telah ikut merespon diplomasi digital (Andika dkk, 2019). Triwibowo dan Martha dalam Syaifani dan Qubba (2017) bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo yang telah menggunakan platform media sosial untuk kegiatan diplomasi mengubah paradigma diplomasi lama yang membuat keterbukaannya akses informasi.

Kondisi hubungan internasional Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo lebih mementingkan kebijakan dalam negeri (*inward looking*), terutama penguatan ekonomi dan infrastruktur hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerapkan

politik luar negeri aktif selama sepuluh tahun berkuasa. Dengan menggunakan jargon seribu teman dan nol musuh (*Thousand Friends and Zero Enemies*), Indonesia selama masa jabatan SBY, ia aktif terlibat dalam hubungan internasional (*outward looking*). SBY aktif berpartisipasi dalam forum internasional untuk membangun citra positif bagi Indonesia. Prinsip “*thousand friends zero enemy*” merupakan suatu proyeksi kekuatan *soft power* Indonesia guna meningkatkan kepercayaan dunia internasional.

Joko Widodo menerapkan kebijakan *down to earth diplomacy* atau diplomasi membumi terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan diplomasi membumi dimaksudkan untuk memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia. Dalam artian segala bentuk kerjasama difokuskan pada kepentingan nasional Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo tidak terlalu fokus pada pembentukan citra positif di kancah Internasional.

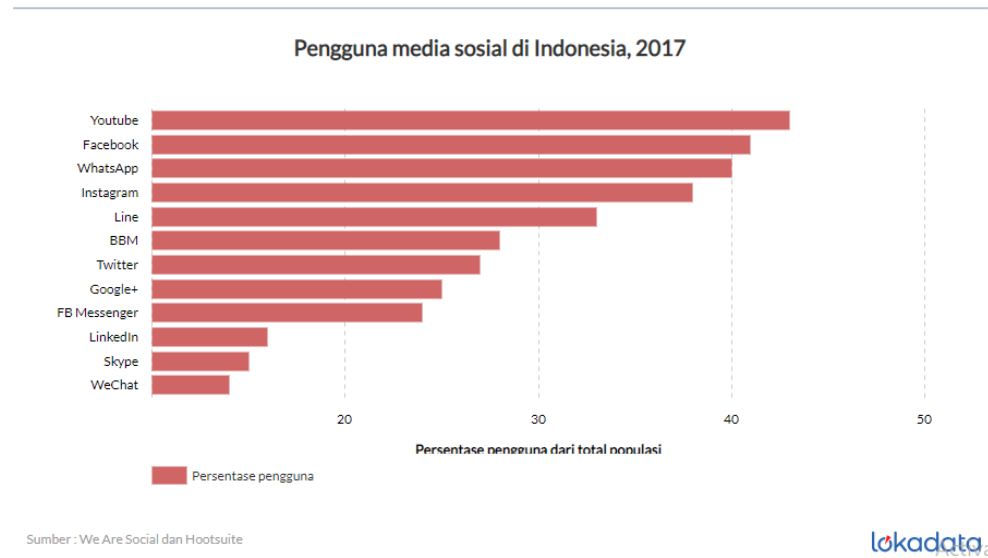
Perbedaan latar belakang dengan SBY menjadi salah satu faktor yang menentukan gaya kepemimpinan Joko Widodo. SBY yang berlatar belakang militer dan memiliki pengalaman politik nasional dan internasional berbeda dengan Joko Widodo yang belum terbiasa dengan forum-forum internasional multilateral. Keaktifan di forum-forum internasional akan menciptakan rasa saling percaya (*trust*). Kepercayaan tersebut akan melahirkan legitimasi dan citra positif pada suatu negara. Kemudian legitimasi dan citra positif tersebut akan memudahkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya baik di kancah domestik maupun internasional.

Namun pada era Presiden Joko Widodo, penggunaan media sosial semakin banyak digunakan untuk diplomasi dan sosialisasi politik luar negeri Indonesia. Contohnya adalah akun media sosial aktif Kementerian Luar Negeri. Akun @kemlu_RI di Instagram yang merupakan salah satu akun media sosial pemerintahan yang digunakan pada masa pemerintahan Joko Widodo yaitu pada tahun 2016 dimana Kementerian Luar Negeri Indonesia mulai aktif menggunakan akun media sosial tersebut sebagai instrumen diplomasi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lee dkk (2015) mengenai Instagram menunjukkan pentingnya interaksi ketika sebuah organisasi ingin membangun dan memupuk hubungan organisasi-publik. Graham dan Avery juga melakukan penelitian dan kemudian menemukan bahwa halaman Instagram milik organisasi resmi seperti pemerintah digunakan untuk menyebarkan informasi (Graham & Avery, 2013). Hal ini karena popularitas media sosial, biaya rendah, relatif mudah digunakan, dan kemampuan menjangkau khalayak luas menjadikan media sosial sebagai alat yang tidak dapat diabaikan oleh praktisi humas pemerintah daerah (Farhatiningsih, 2018).

Dapat dilihat pada gambar 1.1, penggunaan Instagram terdapat pada peringkat ke-4 dimana peringkat pertama dan kedua ditempati oleh Youtube dan Facebook. Instagram memiliki fiturnya yang lebih beragam, kreatif dan menarik. Fenomena ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam merespon diplomasi digital (Sari, 2021).

Gambar 1.1 Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2017



Sumber: Lokadata, 2017

Berdasarkan data *Internet World Stats* tahun 2017 Indonesia menempati urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak (Syaifani & Qubba, 2017). Pada data tersebut dua negara di bawah Indonesia ditempati oleh Jepang dan Rusia. Menarik melihat dua negara ini merupakan negara yang dikenal maju dalam bidang teknologinya namun Indonesia dapat mengungguli kedua negara tersebut, faktor pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang membuat Indonesia menjadi pengguna internet terbesar ke-5 dan dapat mengalahkan dua negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus belajar mengoptimalkan platform digitalnya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.

Dari pemaparan fakta diatas penelitian ini akan menganalisis proyeksi diplomasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Joko Widodo menggunakan media sosial Instagram untuk melihat bagaimana akun @kemlu_ri menciptakan citra positif

Indonesia dengan corak kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Joko Widodo. Hal tersebut menjadi penting mengingat dengan bergantinya kepemimpinan maka akan menimbulkan perubahan dan yang dimaksud dengan perubahan yakni mengenai kebijakan luar negeri yang dijalankan dan hal tersebut akan memberikan implikasi pada citra Indonesia.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, identifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pergantian kepemimpinan membuat perubahan dalam kebijakan luar negeri sehingga membuat citra Indonesia juga ikut mengalami perubahan
2. Pergeseran praktik diplomasi di Indonesia era Joko Widodo menjadi diplomasi digital
3. Indonesia pada tahun 2017 merupakan pengguna media sosial terbesar ke-5

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan untuk menghasilkan uraian yang sistematis. Maka penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai diplomasi digital menggunakan media sosial Instagram pada pemerintahan Joko Widodo, kemudian melihat bagaimana proses diplomasi digital Kementerian Luar Negeri Indonesia, serta penelitian ini dibatasi pada tahun 2016-2019.

1.4. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana proyeksi citra positif Indonesia pada akun media sosial Instagram Kementerian Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016-2019?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini akan dianalisa menggunakan teori diplomasi digital Buhmann & Igenhoff, dengan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis unggahan-unggahan akun Instagram @Kemlu_RI dalam mengelola citra Indonesia.
2. Untuk menganalisis bahwa perkembangan teknologi khususnya penggunaan media sosial menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi Indonesia dalam menciptakan citra positif Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan serta masukan bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional saat ini, khususnya di bidang ilmu Diplomasi Publik. Kemudian juga untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah berkaitan dengan hal-hal yang dapat di aplikasikan ke dalam kehidupan yang nyata atau terhadap satu individu, kelompok ataupun organisasi. Dilihat dari segi praktis, hasil penelitian ini sebagai masukan bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan penggunaan media sosial khususnya Instagram sebagai instrumen atau alat yang mendukung diplomasi digital yang dapat menciptakan citra positif Indonesia.